

Tanggapan Petani Terhadap Implementasi Penggunaan Kartu Tani di Kabupaten Sukabumi

Farmers' Response to The Implementation of Farmer Card Use in Sukabumi Regency

Dedi rosadi

Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi

Jl. Suryakencana Kel. Selabatu Kec. Cikole Kota Sukabumi Prov. Jawa Barat, 085758135549

E-mail : rosadicjr@gmail.com

Abstrak

Pengkajian ini bertujuan untuk mengetahui tanggapan petani terhadap implementasi penggunaan Kartu Tani yang mencakup kemudahan mendapatkan, memahami manfaat dan penggunaan kartu tani. Metode yang digunakan dalam pengkajian ini adalah kualitatif dengan respondennya yaitu petani di Desa Muaradua Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi. Responden diwawancarai langsung pada tanggal 4 Desember 2021 di sekretariat kelompok tani. Sampel diambil 10 orang dari 42 orang responden untuk diwawancarai secara mendalam. Hasil dari pengkajian ini menunjukkan bahwa proses mendapatkan dan pemahaman kegunaan kartu tani itu mudah. Responden telah memenuhi syarat sekaligus memiliki wawasan yang baik dalam menggunakan kartu tani. Responden menilai informasi yang didapat melalui kegiatan sosialisasi yang disampaikan oleh penyuluh pertanian setempat cukup baik sehingga harapannya tercapai.

Kata Kunci : Implementasi; Kartu Tani; Penggunaan; Petani

Abstract

This study aims to find out the response of farmers to the implementation of the use of Farm Cards that include the ease of obtaining, understanding the benefits and use of farm cards. The method used in this study is qualitative with the respondents, namely farmers in Muaradua Village, Kadudampit District, Sukabumi Regency. Respondents were interviewed directly on December 4, 2021 at the secretariat of the farmer group. The sample was taken by 10 people from 42 respondents to be interviewed in depth. The results of this study show that the process of obtaining and understanding the usefulness of kartu tani is easy. Respondents have qualified as well as have good insight in using farm cards. Respondents assessed the information obtained through socialization activities delivered by local agricultural extension workers well enough that the expectations were achieved.

Keywords: Implementation, Farmer Card, Usage, Farmers

1. PENDAHULUAN

Kartu Tani Indonesia merupakan kartu multifungsi yang memuat informasi petani, lahan, kebutuhan sarana produksi pertanian, informasi panen, maupun sebagai kartu debit untuk penerimaan tabungan, pinjaman maupun bantuan. Kartu Tani dapat membantu memberikan informasi dan monitoring bagi pemerintah daerah, BUMN penyedia saprotan, maupun BUMN off taker. Kartu Tani juga sebagai alat bantu untuk menjamin ketersediaan dan distribusi pupuk bersubsidi agar dapat diterima secara benar oleh petani yang berhak [2].

Pembangunan pertanian dilakukan dengan memanfaatkan teknologi modern yang tepat guna dan berkelanjutan. Kegiatan pertanian di dominasi oleh penggunaan pupuk yang bertujuan untuk menghasilkan kualitas dan kuantitas dari hasil pertanian. Realitas yang seringkali ditemui oleh petani adalah kelangkaan pupuk, harga yang naik turun, ketika mendistribusikan pupuk untuk masyarakat mengalami masalah. Di dalam mengatasi kelangkaan pupuk yang terjadi, pemerintah menetapkan kebijakan yakni Peraturan Presiden No 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang berfungsi sebagai bentuk pengawasan yang dilakukan pemerintah dalam mengawasi alokasi pupuk bersubsidi. Berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi TA 2018 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian RI tahun 2017, pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/ atau petani di sektor pertanian [5].

Berdasarkan Juklak Penyediaan Pupuk Bersubsidi Tahun 2018 terdapat lima jenis pupuk bersubsidi yang dialokasikan untuk masyarakat yaitu urea, SP 36, ZA, NPK, dan organik [2].

Permasalahan pada distribusi pupuk adalah sistem yang diterapkan saat ini menunjukkan kinerja yang belum optimal. Hal tersebut antara lain ditunjukkan dengan seringnya terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi, terlambatnya distribusi pupuk bersubsidi, dan subsidi yang tidak tepat sasaran. Dampaknya adalah harga pupuk di tingkat pengecer tidak

sepenuhnya mengacu pada harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan, dan mengakibatkan pemupukan tidak berjalan optimal. Pada pra kartu tani, penyaluran pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan masih seringkali mengalami berbagai permasalahan. Permasalahan utama kinerja penyaluran pupuk bersubsidi adalah pada sisi perencanaan, distribusi, sampai dengan pengawasan [1].

Oleh karena itu, diperlukan perbaikan baik dari sisi penyusunan kebijakan untuk perencanaan kebutuhan pupuk, manajemen pengelolaan distribusi pupuk, sampai dengan pengawasan agar memenuhi kriteria 6, sebagaimana Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/SR.310/12/2017 tentang Alokasi dan Penetapan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yaitu tepat waktu, tepat harga, tepat mutu, tepat jumlah, tepat jenis, dan tepat tempat. Sebagai tindak lanjut, Pemerintah telah mencanangkan Program Kartu Tani untuk mengelola penyaluran pupuk bersubsidi [4].

Dalam Kartu Tani, Program Kartu Tani di Jawa Tengah telah dimulai sejak tanggal 4 Maret 2015, namun hingga saat ini belum sepenuhnya berjalan lancar. Beberapa masalah muncul ketika petani maupun Kios Pupuk Lengkap (KPL) diminta untuk menerapkan Kartu Tani dan mesin *Electronic Data Capture* (EDC) sebagai media transaksi. Beberapa masalah tersebut antara lain terkait minimnya pemahaman petani dan KPL terhadap Program Kartu Tani, kendala penggunaan kartu berbasis *chip* (Kartu Tani), dan keterbatasan kemampuan keuangan petani. Selain itu, petani juga merasa khawatir kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi atas kebijakan baru tersebut [3].

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Bank BNI dan dimuat dalam Laporan Evaluasi atas Pelaksanaan Program Kartu Tani tahun 2017–2018 di wilayah Jawa Timur dan Bank BRI di wilayah Jawa Tengah, serta hasil *Focus Group Discussion* (FGD) dengan *stakeholders* di wilayah Kabupaten Kendal yaitu dengan Dinas Pertanian dan

Pangan, BRI Cabang Kendal dan perwakilan PT Pupuk Indonesia *Holding Company* tentang Permasalahan Implementasi Program Kartu Tani, diperoleh 6 faktor utama yang memengaruhi pelaksanaan penerapan Kartu Tani yaitu: (i) faktor pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan; (ii) faktor perilaku dan sosial budaya masyarakat Kendal; (iii) faktor kondisi perekonomian masyarakat; (iv) isu ketersediaan pupuk ketika muncul suatu kebijakan baru; (v) faktor sarana dan prasarana; dan (vi) faktor dukungan *stakeholders* [4]

Keenam faktor tersebut kemudian dilakukan analisis berdasarkan kuesioner yang telah disebar kepada responden untuk selanjutnya dicari hubungannya dengan efek Kartu Tani penerapan Kartu Tani. Adapun efek Kartu diukur dari 2 sisi yaitu dari sisi ketepatan sasaran program dan tingkat penerapan Kartu Tani. Bisnis proses penyaluran pupuk bersubsidi melalui Program Kartu Tani yang akan diteliti adalah pada saat proses distribusi antara agen lini IV (tingkat kecamatan) dengan petani. Pada proses ini, Kartu Tani digunakan sebagai media transaksi dan agen pupuk dalam hal ini KPL diwajibkan menyediakan mesin EDC sebagai media penerimaan transaksi. Pemerintah Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan Bank Mandiri, menghadirkan kartu tani sebagai sarana dalam mengoptimalkan kebijakan pupuk bersubsidi bagi masyarakat [8].

Kartu tani menurut Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 521./014725 tentang Petunjuk Teknis Kartu Tani Melalui Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pangan Indonesia di Provinsi Jawa Barat, merupakan kartu debit Mandiri cobranding yang digunakan secara khusus untuk membaca alokasi pupuk bersubsidi dan transaksi pembayaran pupuk bersubsidi di mesin EDC (Electronic Data Capture) Mandiri yang ditempatkan di pengecer serta dapat berfungsi untuk melakukan seluruh transaksi perbankan pada umumnya. Penggunaan kartu tani terintegrasi dengan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pangan Indonesia (SIMPI) [6].

Sistem tersebut berisikan data RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang terdiri dari nama petani, luas lahan, jenis tanaman, dan alokasi pupuk yang dibutuhkan petani Tujuan dari program Kartu tani bagi masyarakat adalah penyaluran pupuk bersubsidi yang tepat sasaran dengan berlandaskan pada enam asas yaitu Tepat jenis, Tepat jumlah, Tepat mutu, Tepat lokasi, Tepat waktu, Tepat harga. Petani yang menggunakan kartu tani mendapatkan pupuk bersubsidi sesuai kebutuhan diseluruh agen atau kios yang telah ditentukan, dimana kegiatan pertanian dapat berjalan aman tanpa terganggu oleh tidak tersedianya pupuk bersubsidi. Kartu tani juga berfungsi sebagai tabungan yang dapat digunakan petani untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berdasarkan tingkat peringkat penggunaan kartu tani di Provinsi Jawa Barat yang bersumber dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat 2018 menunjukkan peringkat penggunaan kartu tani di Provinsi Jawa Barat berdasarkan Kabupaten/ Kota tahun 2018 [7].

Salah satu Kabupaten dengan tingkat penggunaan tertinggi adalah Kabupaten Sukabumi dengan alokasi lima jenis pupuk sebanyak 49.162 ton, realisasi 26.403 ton, persentase 54,82 % dan transaksi berjumlah 178.451 [6].

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi, dapat diketahui bahwa jumlah keseluruhan penerima kartu tani di Kabupaten Sukabumi adalah 92.736 jiwa yang terbagi ke dalam 49 kecamatan [8].

Kecamatan dengan jumlah penerima kartu tani terbanyak adalah Kecamatan Surade dengan jumlah 3.207 jiwa yang berasal dari 94 kelompok tani dan alokasi pupuk sebesar 2.053,68 ton per tahun, sedangkan kecamatan dengan jumlah terkecil adalah Kecamatan Bojong Genteng yakni 524 jiwa yang berasal dari 45 kelompok tani dan alokasi pupuk bersubsidi sebanyak 354,25 ton per tahun [6].

Kecamatan Kadudampit terkhusus Desa Muaradua diperoleh data 157 Kartu Tani yang sudah diterbitkan sampai tahun 2021 yang

terbagi dari 7 kelompok tani. Pada pelaksanaan Kartu Tani dari mulai pengumpulan data dasar seperti KK dan KTP, identifikasi potensi sumberdaya petani sampai dengan menghitung jumlah kebutuhan pupuk bersubsidi yang tertuang dalam RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kebutuhan) dilaksanakan oleh pengurus kelompok tani dibantu dengan penyuluh pertanian setempat [6].

2. METODE

Pengkajian dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2021 dengan menggunakan metode kualitatif. Responden sebanyak 42 orang adalah petani dari 7 kelompok tani yang ada di Desa Muaradua Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi. Responden untuk wawancara mendalam diambil sepuluh orang dari total responden. Responden diberi pertanyaan terbuka tentang variabel yang dikaji, yaitu kemudahan mendapatkan, memahami manfaat dan menggunakan KARTU TANI yang diantaranya untuk memperoleh pupuk bersubsidi.

Prosedur pengambilan responden untuk wawancara mengikuti karakteristik yang ditetapkan oleh Sarankatos [1], adalah sebagai berikut :

- 2.1.1. Jumlah sampel kecil dan dengan kasus yang khusus dalam hal ini petani yang dijadikan responden.
- 2.1.2. Sampel tidak ditentukan secara kaku sejak awal, tetapi dapat berubah baik jumlah maupun karakteristiknya sesuai dengan pemahaman konseptual yang berkembang dalam penelitian.
- 2.1.3. Sampel tidak diarahkan pada keterwakilan, melainkan pada kecocokan konteks.

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi tentang makna-makna subjek kartu Tanif yang difahami oleh reponden terkait dengan implementasi Kartu Tani. Wawancara dilakukan secara lisan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang fleksibel, bergantung pada jawaban reponden yang diwawancarai. Pilihan jawaban tertentu tidak disediakan, tetapi responden diberi kebebasan untuk menjawab sesuai dengan isi hati, sikap dan

pandangan atau pikirannya.

Prosedur ini didasarkan pada prosedur Patton yaitu wawancara dimulai dengan memberi penjelasan tentang tujuan wawancara dan dicatat. Analisis dilakukan dalam bentuk pengamatan terhadap proses pengadaan kartu tani hingga ke tingkat penggunaannya secara berjenjang. Selama wawancara, responden bebas mengemukakan komentar maupun proses dan hasil penelusurannya yang ditanyakan dengan bahasa mereka tanpa diberi kategori jawaban [5]. Pengamatan dan hasil penelusuran kemudian dikumpulkan.

Analisis data difokuskan pada jawaban responden terhadap pertanyaan yang diajukan, kemudian dibuat transkripnya dan dilakukan proses sebagai berikut :

- 2.2.1. Reduksi data yang berlangsung secara terus-menerus selama penelitian berlangsung. Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transpormasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis selama wawancara. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis untuk mempertajam, menggolongkan, mengarahkan , membung yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sehingga kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.
- 2.2.2. Penyajian data untuk menampilkan sekumpulan informasi yang mungkin dapat dijadikan dasar penarikan kesimpulan. Penyajian data yang menggunakan teks naratif.
- 2.2.3. Penarikan kesimpulan/verifikasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengkajian ini diawali dengan kegiatan penyuluhan pertanian yang memang rutin dilakukan oleh penyuluh setempat disetiap kelompok tani, diantaranya sosialisasi kartu tani. Hal dilakukan dikarenakan sebagian petani belum sepenuhnya memahami apa itu Kartu Tani, manfaat dan cara penggunaannya.

3.1. Kemudahan mendapatkan Kartu Tani

Cara mendapatkan Kartu Tani sebetulnya cenderung mudah apabila prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang

ditempuh dengan baik, diantara ketentuannya adalah sebagai berikut :

- 3.1.1. Calon pemegang harus tergabung dalam kelompok tani.
- 3.1.2. Petani harus melengkapi berkas fotokopi e-KTP dan Tanda Kepemilikan Tanah, buKartu Tani setoran pajak tanah, buKartu Tani sewa, dan anggota LMDH.
- 3.1.3. Verifikasi RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok). Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) melakukan pendataan dan verifikasi data ke lapangan (NIK, luas lahan, komoditas, dan jenis pupuk) yang kemudian PPL meng-upload data petani ke dalam SINPI.
- 3.1.4. PPL Melakukan upload Data RDKK dan upload alokasi pupuk bersubsidi, serta petani harus hadir di bank yang telah ditentukan.
- 3.1.5. Setelah selesai, petugas bank akan menyerahkan Kartu Tani dan Buku Tabungan kepada petani untuk melakukan pembelian pupuk bersubsidi.

3.2. Manfaat Kartu Tani

Pada dasarnya kartu tani merupakan kartu debit seperti kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Adapun kartu ini digunakan para petani untuk berbagai kebutuhan dan memenuhi keperluan pertaniannya. Keberadaan Kartu Tani diharapkan membawa dampak yang positif bagi semua kalangan. Tidak hanya bagi pemerintah dan pihak terkait saja, melainkan yang paling penting adalah manfaat bagi para petani, diantaranya yaitu :

- 3.2.1. Pupuk bersubsidi Dengan memiliki Kartu Tani, terang Sarwo Edhy, pertama mendapat kepastian dalam memperoleh pupuk bersubsidi. Pupuk merupakan komponen penting dalam sebuah pertanian, maka dari itu ketersediaan pupuk adalah hal mutlak.
Dengan adanya Kartu Tani, nantinya para petani dapat menggunakannya dalam membeli pupuk bersubsidi. Langkah seperti ini juga efektif dalam menyalurkan pupuk bersubsidi tepat

sasaran.

- 3.2.2. Penjualan langsung Keuntungan berikutnya, petani dapat melakukan penjualan hasil panen tanpa perantara. Kendala yang dihadapi oleh para petani adalah ketika musim panen tiba. Sebab, hasil yang didapat tidak serta merta dapat dinikmati. Alasannya adalah petani terpaksa menjual hasil pertanian kepada para tengkulak yang mengambil untung besar. Keberadaan Kartu Tani ini diharapkan akan memangkas praktik penjualan hasil pertanian yang tidak sehat ini sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Di sini para petani dapat dengan mudah melakukan penjualan secara langsung ke Bulog selaku off taker. Petani cukup membawa Kartu Tani dan menimbang hasil panen. Hasil panen nantinya akan di-input dan muncul besaran pembayaran di server Sistem Informasi Pertanian Indonesia (SINPI) dan akan dikirimkan ke telepon genggam petani via pesan singkat.
- 3.2.3. Pembayaran kredit usaha Keuntungan lainnya adalah kemudahan pembayaran kredit usaha. Ketika petani mendapatkan keuntungan yang lebih dari hasil penjualan selama masa panen, maka dana yang dimiliki bisa digunakan untuk unit usaha lainnya. Dengan menggunakan Kartu Tani, para petani dapat mengajukan kredit usaha di lembaga perbankan dan keuangan yang telah ditunjuk oleh pemerintah.
Kartu Tani ini pun digunakan untuk memverifikasi data para petani ketika melakukan pengajuan pinjaman kredit usaha. Dengan demikian, semua proses akan berjalan lancar karena data-data yang ada langsung masuk ke kartu tani tersebut. Masalah lainnya yang ada dalam pertanian adalah masih adanya para petani yang belum menggunakan rekening bank untuk menyimpan uang hasil panen mereka karena cara yang digunakan masih konvensional, hal ini masih ditemui di

beberapa daerah.

Faktornya adalah letak bank yang cukup jauh dan terkendala mengenai persyaratan lainnya. Kartu tani memberikan sebuah alternatif baru.

DAFTAR PUSTAKA

- 3.2.4. Tabungan dan bantuan sosial Selain itu, dengan memiliki kartu tani maka petani bisa menggunakannya sebagai tabungan dan bisa meminimalisasi kerugian finansial jika dibandingkan dengan cara konvensional. Terakhir, manfaat Kartu Tani yang bisa dirasakan oleh para petani ialah kemudahan dalam mendapatkan bantuan sosial maupun subsidi. Terutama untuk bidang pertanian dan beberapa program nasional kementerian terkait. Contohnya program bantuan sosial Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi, dan Kementerian Pertanian yang memiliki andil besar dalam memajukan dan memfasilitasi kebutuhan petani di Indonesia.
- 3.2.5. Penggunaan Kartu Tani Setelah para petani memperoleh kartu tani dari bank Mandiri, maka petani dapat mendatangi kios - kios distributor pupuk guna mendapatkan pupuk bersubsidi. Besaran alokasi yang dibutuhkan nantinya sudah tercatat dalam data iwalet yang tertuang dalam kartu tani. Petugas dari kios bisa membantu petani untuk mengecek besaran jatah pupuk di dalam kartu tani melalui mesin EDC, seperti yang ada di kasir swalayan. Nantinya akan terlihat berapa besaran jatah pupuk yang dimiliki oleh petani tersebut dan bisa diambil. Petani datang membawa kartu, kartu digesek, kios melakukan (Inqweri) melihat alokasi petani. Pembayaran bisa dilakukan secara tunai, dengan harga yang sudah ditentukan. Setelah petani membeli pupuk, otomatis kuota pupuk dalam iwalet juga akan berkurang sesuai pengambilan.

[1] Poerwandari, Kristi. E. (1998). Pendekatan Kualitatif Untuk Penelitian Perilaku Manusia.

[2] Koko Widyat Moko, Suwanto Suwanto, Bekti Wahyu Utami. (2017). Presepsi Petani Terhadap Program Kartu Tani di Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen.

[3] Muhammad, Lutfil Chakim. (2019) Pengaruh Implementasi Kartu Tani Terhadap Efektivitas Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. *Jurnal Pangan, Sekolah Bisnis IPB*.

[4] Mutiara Latifa Ashari, Dra. Dyah Hariani, MM. (2019). Analisis Efektivitas Program Kartu Tani Di Kecamatan banjarnegara Kabupaten banjarnegara.

[5] Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian. <https://app2.pertanian.go.id/simluh> dan <https://erdkk.pertanian.go.id>. Akses 10 Juli 2021.

[6] Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat. <http://distan.jabarprov.go.id>. Akses 07 Juli 2021.

[7] Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi. <https://sukabumikab.go.id>. Akses 08 Juli 2021.

[8] Kementerian Republik Indonesia. <https://www.pertanian.go.id>. Akses 08 Juli 2021.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pengkajian yang telah dilakukan oleh penulis maka dapat disimpulkan bahwa secara umum petani di Desa Muaradua Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi mudah mendapatkan, mengenal manfaat dan tau bagaimana cara penggunaan kartu tani tersebut.